

Legislator PKS Usulkan Penguatan Peran Keluarga dan Kegiatan Keagamaan Menyikapi Isu LGBT di Bekasi

KOTA BEKASI, Prolite – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Chairun Nisa, menyampaikan pandangannya terkait isu LGBT yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius di Kota Bekasi. Ia menilai upaya pencegahan perlu dilakukan melalui penguatan peran keluarga, pendidikan agama, serta dukungan regulasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam keterangannya pada Sabtu (11/7/2026), Chairun Nisa menyebut adanya informasi mengenai jumlah kasus LGBT di Kota Bekasi yang diperkirakan mencapai sekitar 6.000 orang. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian karena dinilai berkaitan dengan meningkatnya kasus HIV akibat perilaku seksual berisiko.

Atas dasar itu, ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk karakter anak. Menurut Chairun Nisa, keluarga memiliki posisi penting dalam memberikan pendidikan moral, nilai kehidupan, serta pendampingan kepada anak sejak usia dini.

Baca Juga:Proyek PSEL Kota Bekasi Dipercepat, Pemerintah dan DPRD Matangkan Persiapan Menuju Tahap Konstruksi

“Ini bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Kita harus bersama-sama meningkatkan kewaspadaan karena dampaknya bukan hanya terhadap individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan yang paling dekat, yaitu keluarga,” ujar Chairun Nisa.

Ia berpandangan bahwa komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak, disertai pengawasan yang dilakukan secara konsisten, menjadi salah satu faktor penting dalam membangun karakter generasi muda. Menurutnya, kehadiran orang tua sebagai pendidik pertama di lingkungan keluarga berperan dalam memberikan kasih sayang, perhatian, dan pemahaman mengenai nilai-nilai kehidupan.

“Pondasi keluarga harus benar-benar kuat. Orang tua harus hadir sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya, memberikan kasih sayang, perhatian, sekaligus pemahaman mengenai nilai-nilai kehidupan yang benar,” katanya.

Baca Juga: Siaga Kemarau 2026, Pemkab Bandung Barat Perkuat Antisipasi Kekeringan dan Karhutla

Selain menyoroti pentingnya keluarga, Chairun Nisa juga menilai pendidikan agama memiliki peran strategis dalam membentuk moral dan akhlak masyarakat. Ia mendorong agar kegiatan keagamaan seperti pengajian, kajian rutin, serta pembinaan spiritual terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.

“Agama harus menjadi ujung tombak dalam membangun moral masyarakat. Kajian rutin, pembinaan keagamaan, dan pendidikan akhlak perlu diperbanyak agar keimanan semakin kuat. Dengan begitu, setiap orang akan selalu mengingat bahwa Allah SWT senantiasa melihat dan mengawasi setiap perbuatan manusia,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Chairun Nisa juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang, menurutnya, memberikan perhatian terhadap isu LGBTQ dalam perspektif ketahanan sosial dan nasional. Ia berharap langkah-langkah yang ditempuh pemerintah lebih menitikberatkan pada edukasi, pembinaan, serta penguatan regulasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Saya mendukung kebijakan pemerintah pusat yang memberikan perhatian serius terhadap persoalan LGBTQ. Negara harus hadir untuk melindungi masyarakat melalui langkah-langkah yang mengedepankan pencegahan, pembinaan, serta perlindungan terhadap generasi muda,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD Kota Bekasi untuk membahas kemungkinan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pelarangan praktik LGBT sesuai kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, regulasi tersebut dapat menjadi landasan dalam memperkuat edukasi,

Legislator PKS Usulkan Penguatan Peran Keluarga dan Kegiatan Keagamaan Menyikapi Isu LGBT di Bekasi

pembinaan masyarakat, serta upaya menjaga ketahanan sosial di Kota Bekasi.

“Kami berharap Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD segera menyusun dan membahas perda yang dapat menjadi dasar penguatan perlindungan masyarakat. Regulasi harus mampu memberikan kepastian arah kebijakan sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan keluarga dan moral generasi penerus,” pungkas Chairun Nisa. (dit/adv)



Baca Selanjutnya
Proyek PSEL Kota Bekasi Dipercepat, Pemerintah dan DPRD Matangkan Persiapan Menuju Tahap Konstruksi